

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yang berjudul Wewenang Kementerian Perdagangan Terhadap Impor Beras Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu, pertama untuk menganalisa Kebasahan Wewenang Kementerian Perdagangan Dalam Impor Beras, kedua untuk menganalisa Tanggung jawab Kementerian Perdagangan Dalam Impor Beras.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi dan isu hukum yang dibahas

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Di Indonesia kebijakan impor beras dimungkinkan dengan adanya Undang-undang Nomo 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 14 yang menyatakan dalam hal sumber penyediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional belum mencukupi, pangan dapat dipenuhi dengan impor pangan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam Pasal 36 menyebutkan pula kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh Menteri atau lembaga pemerintah di bidang pangan, hal ini pula yang menjadi landasan yuridis terkait kewenangan kementerian perdangan dalam melakukan impor beras. Kedua: Sesuai dengan prinsip “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” yakni tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban maka setiap penggunaan wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab. Karena wewenang melekat pada jabatan, namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka pertanggungjawabannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) sebagai tanggungjawab jabatan, dan (2) sebagai tanggungjawab pribadi.

Kata kunci : Wewenang, Impor beras, Tanggungjawab.

A B S T R A C T

The purposes of the study entitled The Authority of Ministry of Trade Against Rice Imports According to Law Number 18 of 2012 Concerning Food are to analyze the authority of the ministry of trade in rice imports and to analyze the responsibility of the ministry of trade in rice imports.

The research method which is used in this thesis uses a normative law research method which is library research. It is research on legislation and literature relating to the material and legal issues discussed.

Based on the results of the study, it can be concluded that firstly, In Indonesia, the policy of importing rice is possible by the existence of Law No. 18 of 2012 on Food article 14 which states that in terms of sources of food supply originating from domestic production and national food reserves are inadequate, food can be fulfilled by food imports as needed. Furthermore, Article 36 also mentions that the adequacy of domestic staple food production and national food reserves is determined by the minister or government institutions in the food sector, this also forms the legal basis for the authority of the ministry of trade in importing rice. Second, in accordance by the principle of "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" i.e. there is no authority without accountability thus every use of authority by officials is always followed with responsibility. The authority is inherent in the position. However, in its implementation is carried out by humans as representatives or functionaries of the position, therefore the responsibility can be divided into 2 (two), namely: (1) as position responsibility, and (2) as personal responsibilities.

Keywords: *authority, rice import, responsibility.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya, akhirnya penulisan tesis yang berjudul “Wewenang Kementerian Perdagangan Terhadap Impor Beras Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan” dapat penulis selesaikan dengan baik. Dalam penulisan tesis ini membahas mengenai wewenang Kementerian Perdagangan dalam impor beras dan Tanggung Jawab Kementerian Perdagangan dalam impor beras.

Terselesainya penulisan tesis ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. **Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA.,** selaku Rektor Universitas Airlangga
2. **Dr. Nurul Barizah, S. H., LL. M., Ph. D.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. **Prof.Dr.Tatiek Sri djatmiati, S.H.,M.S.** selaku Dosen pembimbing I, dan **Dr.Rr.Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H.** selaku Dosen pembimbing II, yang banyak membantu mengarahkan dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran dan memberikan petunjuk-petunjuk serta saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar dan staf karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

5. Kedua Orang tua saya Bapak **Nuardin S.E., M.MP**, Mama **Yuliharyati S.E.,M,Si**, Kakak Novia Priska, Adik Sepvan Chris dan Adik Flegen serta Keluarga Besar yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga tesis ini dapat bermanfaat serta berguna bagi semua pihak.

Surabaya,9 Januari 2020

Penulis,

Kristi Fosa Akwila S.H